

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Tujuan pembangunan Kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan kedalam pengelolaan yang terdiri atas, pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi. Saat sekarang telah ditetapkan bahwa pembangunan Kehutanan dan perkebunan dititik beratkan pada pemanfaatan sumber daya hutan dan kebun pada kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial secara seimbang (Arief, 2001).

Pengelolaan hutan bukan hanya sekedar menetapkan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim, sumber air, dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan produk lainnya. Tetapi, pengelolaan hutan harus ditujukan untuk mendayagunakan semua lahan demi kepentingan negara, bahkan negara lain juga. Dengan demikian, secara partial akan dimengerti tentang fungsi hidrologis, penyangga hayati, kesuburan tanah, ekonomi, sosial, kebudayaan, rekreasi, dan estetika dari hutan secara keseluruhan. Pembangunan Kehutanan merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pembangunan Kehutanan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan Kehutanan dalam memberikan hasil-hasil yang optimal. Baik berupa barang maupun jasa. Pelaksanaan pembangunan Kehutanan tersebut tentu harus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi sosial ekonomi hutan. Tujuan pembangunan Kehutanan adalah mempertahankan keanekaragaman hayati, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan sumber devisa negara dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat sekitar hutan (Arief, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.733/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, menetapkan kawasan hutan seluas $\pm 8.389.600$ Hektar.

Dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut; Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas $\pm 1.621.046$ hektar, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 2.310.874$ hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 2.132.398$ hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 2.127.365$ hektar, Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 197.918 hektar.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta berbagai insentif ekonomi dalam pengusahaan hutan sehingga merangsang tumbuhnya usaha bidang Kehutanan khususnya dalam bentuk HPH di Indonesia (Syafarani *et al.*, 2017). Dari situ banyak keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor Kehutanan Indonesia melalui sektor Kehutanan merupakan produsen kayu lapis dunia yang layak diperhitungkan, sedangkan dalam konteks pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terdapat beberapa jenis produk yang merupakan komoditas penting perdagangan seperti terpentin, gondorukem/getah damar, jelutung, tengkawang, kemiri, sutera alam, gaharu, sarang burung walet, berbagai jenis tanaman obat dan rempah, serta berbagai jenis lain komoditi perdagangan baik di dalam negeri maupun ekspor. Sub sektor Kehutanan memberikan sumbangan pada devisa negara yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah akan terlihat pada pertumbuhan ekonominya. Sub sektor Kehutanan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ini terlihat pada nilai produksi dari barang dan jasa hasil Kehutanan yang biasanya di daerah dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menjadi sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Kuncoro, 2006). Menurut Jhingan (2013) pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat tahun 2011-2016 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan yang dicapai Kalimantan Barat dapat dikatakan melambat, hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia yang juga menurun di tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2016). Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat tahun 2011-2016. Rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Hanya beberapa kabupaten saja yang mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2015 tetapi kenaikan tersebut tidak mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan pada setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat meningkat dari tahun sebelumnya.

Adanya investasi dari dalam negeri menjadikan sumber modal semakin besar. Besarnya modal akan meningkatkan produksi sektor Kehutanan sehingga pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat dan hal ini akan berdampak meningkatnya PDRB. Selain itu luas hutan produksi yang semakin besar mampu memproduksi atau menghasilkan produk Kehutanan yang tinggi dan ini tentunya menyebabkan PDRB pada sub sektor Kehutanan ikut meningkat. Setiap kegiatan usaha Kehutanan yang dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi (*input*) yang penting dalam usaha Kehutanan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah tenaga kerja Kehutanan dengan kualitas yang memadai maka produksi yang dihasilkan akan meningkat sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dan hal ini tentu berdampak pada peningkatan PDRB sub sektor Kehutanan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah tenaga kerja sektor Kehutanan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Apakah investasi dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Apakah luas hutan produksi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Apakah pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan, tenaga kerja Kehutanan, investasi (PMDN) dan luas hutan produksi berpengaruh terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan, tenaga kerja Kehutanan, investasi dalam negeri (PMDN) dan luas hutan produksi, terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Manfaat penelitian:

Penelitian ini berkontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu di bidang Kehutanan khususnya yang berkaitan dengan fungsi sumber daya hutan sebagai pendorong pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.